

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SD INPRES PRULEME KABUPATEN PUNCAK JAYA

Longga Kogoya<sup>1\*</sup>, Yosephina Ohoiwutun<sup>2</sup>, Hiskia C M Sapioper<sup>2</sup>

1) Mahasiswa Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

2) Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

\* Email: [longgakogoya09@gmail.com](mailto:longgakogoya09@gmail.com)

### Abstract :

*This study aims to analyze the implementation of the School Operational Fund (BOS) policy at SD Inpres Pruleme, Puncak Jaya Regency. The focus of the study includes policy implementation, supporting and inhibiting factors, and the school's efforts to optimize the use of BOS funds. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and document studies. Research informants were determined using purposive sampling techniques. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the implementation of the BOS policy at SD Inpres Pruleme, from a communication perspective, is still constrained by suboptimal information dissemination and coordination. Furthermore, in terms of resources, there are limitations in human resources for financial management and inadequate infrastructure. In terms of disposition, although policy implementers demonstrate commitment in managing BOS funds, understanding of technical regulations and the participation of the school committee in oversight still need to be improved. From the bureaucratic structure aspect, the mechanism for disbursing and reporting BOS funds is still hampered by complex administrative procedures and the lack of an effective monitoring system. Supporting factors include community support, effective communication between schools and the Education Office, and transparency in financial reporting. Meanwhile, the inhibiting factors are limited infrastructure, low budget management capacity, miscommunication between governments, and difficult road access, which hinder distribution and the effectiveness of BOS fund use. Improvement efforts are carried out through transparent planning, capacity building through training, publication of financial reports, optimization of fund use according to priorities, and regular monitoring and evaluation to enhance education quality.*

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya. Fokus penelitian mencakup Implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BOS di SD Inpres Pruleme, dari aspek komunikasi, masih terkendala dalam penyebaran informasi dan koordinasi yang belum optimal. Kemudian, aspek sumber daya, keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan serta infrastruktur yang kurang memadai. Lalu aspek disposisi, terlihat meskipun pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dalam pengelolaan dana BOS, pemahaman terhadap aturan teknis dan partisipasi komite sekolah dalam pengawasan masih perlu ditingkatkan. Dari aspek struktur birokrasi, mekanisme pencairan dan pelaporan dana BOS masih terhambat oleh prosedur administratif yang kompleks serta kurangnya sistem monitoring yang efektif. Faktor pendukungnya meliputi; dukungan masyarakat, komunikasi yang efektif antara sekolah dan Dinas Pendidikan, serta transparansi dalam pelaporan keuangan. Sedangkan, faktor penghambatnya ialah keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas pengelolaan anggaran, serta miskomunikasi antar pemerintah dan akses jalan yang sulit menghambat distribusi serta efektivitas penggunaan dana BOS. Upaya peningkatan dilakukan melalui perencanaan transparan, peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan, publikasi laporan keuangan, optimalisasi penggunaan dana sesuai prioritas, serta pengawasan dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas pendidikan.*

**Keyword:** Policy Implementation, School Operational Assistance, SD Inpres Pruleme, Puncak Jaya, Papua

## PENDAHULUAN

Penyaluran dana BOS melibatkan alur yang berjenjang untuk memastikan akuntabilitasnya. Proses dimulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan yang mentransfer dana BOS ke rekening kas daerah (RKUD) berdasarkan data jumlah siswa yang terverifikasi melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Setelah itu, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, menyalurkan dana tersebut langsung ke rekening sekolah. Sekolah kemudian mengelola dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis, yang mencakup pembiayaan kegiatan operasional dan program peningkatan mutu pendidikan, seperti pengadaan alat tulis, buku, atau perawatan fasilitas. Dalam praktiknya, setiap tahap alur dilengkapi mekanisme pengawasan, mulai dari pelaporan ke Dinas Pendidikan hingga pemantauan langsung dari pihak terkait (Rahayuningsih, 2021). Hal ini bertujuan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif, meskipun sering kali kendala geografis, keakuratan data, dan kurangnya pengawasan menjadi tantangan di daerah terpencil seperti Kabupaten Puncak Jaya.

Kabupaten Puncak Jaya merupakan salah satu daerah tertinggal dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Letaknya yang berada di pegunungan serta minimnya infrastruktur menyebabkan keterbatasan dalam aksesibilitas pendidikan. Banyak sekolah di daerah ini mengalami kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, serta keterbatasan tenaga pendidik yang profesional. Oleh karena itu, implementasi program BOS di daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membantu sekolah-sekolah menjalankan operasionalnya secara lebih baik.

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program nasional yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah guna meningkatkan akses dan kualitas

pendidikan di seluruh Indonesia (Nursiniah & Aliyyah, 2024). Dana BOS dialokasikan oleh pemerintah pusat berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah yang terdaftar, yang kemudian disalurkan melalui tahapan-tahapan tertentu. Awalnya, pemerintah pusat mentransfer dana ke rekening kas umum daerah di tingkat provinsi, yang bertanggung jawab atas pendistribusian lebih lanjut ke kabupaten/kota. Selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota menyalurkan dana tersebut langsung ke rekening sekolah penerima. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa dana yang disediakan sampai tepat waktu dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pembelian buku pelajaran hingga perbaikan fasilitas sekolah.

Mekanisme penyaluran dana BOS dimulai dari pemerintah pusat melalui rekening khusus Kementerian Keuangan, kemudian diteruskan langsung ke rekening sekolah yang memenuhi persyaratan, seperti sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki jumlah siswa minimal 60 orang dalam tiga tahun terakhir. Besaran dana yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa, dengan alokasi per siswa berbeda untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Penggunaan dana harus mengikuti rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKAS) yang sebelumnya disusun oleh sekolah dan disetujui komite sekolah. Kendala sering muncul dalam keterlambatan pencairan akibat ketidaksesuaian data Dapodik atau kurangnya kesiapan sekolah dalam memenuhi persyaratan administratif (Winayah, dkk, 2022).

Dana BOS juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengadaan sarana pembelajaran modern, penyediaan buku pelajaran, dan peningkatan program ekstrakurikuler (Ritaudin, 2021). Namun, tantangan seperti kurangnya kapasitas kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan dan minimnya pengawasan efektif dari instansi terkait masih menjadi hambatan dalam

pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, upaya pengelolaan dana BOS secara transparan, akuntabel, dan profesional sangat diperlukan agar tujuan pengembangan pendidikan dapat tercapai secara maksimal (Banding, 2024).

Namun, dalam praktiknya, penyaluran dana BOS sering menghadapi tantangan yang signifikan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Puncak Jaya. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan dalam proses transfer dana akibat kompleksitas administrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, ketidaksesuaian data terkait jumlah siswa yang menjadi dasar alokasi dana sering kali memperlambat distribusi, terutama di wilayah dengan infrastruktur komunikasi dan transportasi yang terbatas. Di beberapa daerah, keterlambatan ini dapat berlangsung selama beberapa bulan, sehingga mengganggu kegiatan operasional sekolah. Selain itu, kurangnya kapasitas teknis di tingkat kabupaten/kota dalam mengelola distribusi dana turut menjadi faktor yang memperlambat implementasi kebijakan ini.

Di tingkat sekolah, tantangan utama terletak pada pengelolaan dana BOS dan kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak pemerintah daerah. Kepala sekolah dan bendahara sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam administrasi keuangan, yang berpotensi mengarah pada ketidaksesuaian penggunaan dana dengan prioritas pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, minimnya pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan dana BOS memperbesar risiko penyimpangan, seperti alokasi untuk keperluan di luar pendidikan. Rendahnya akuntabilitas di daerah terpencil sering kali mengurangi efektivitas program ini. Dengan demikian, penyaluran dan pengelolaan dana BOS tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik tetapi juga dukungan teknis dan komitmen pengawasan yang konsisten dari semua tingkatan pemerintahan.

SD Inpres Pruleme sebagai salah satu sekolah dasar di Puncak Jaya,

menghadapi sejumlah tantangan. Sekolah ini terletak di wilayah pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan daerah, sehingga akses terhadap fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang memadai sangat terbatas. Seperti banyak sekolah di daerah terpencil lainnya, SD Inpres Pruleme sangat bergantung pada dana BOS untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Namun, proses implementasi dan pengelolaan dana BOS di sekolah ini juga dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterlambatan pencairan dana dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaannya.

Penerimaan dana BOS di SD Inpres Pruleme, seperti di banyak sekolah lain, ditentukan oleh data jumlah siswa yang diinputkan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dana ini dialokasikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar aktif. Namun, salah satu kendala yang sering dihadapi adalah keakuratan data Dapodik, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Puncak Jaya, yang dapat memengaruhi distribusi dana secara menyeluruh kepada semua siswa. Kendala geografis dan akses internet menjadi faktor yang turut menghambat pembaruan data secara real-time, sehingga dapat terjadi ketidakcocokan antara jumlah siswa aktual dan data penerima dana BOS.

Dalam pelaksanaan program BOS, sekolah juga diwajibkan untuk mematuhi petunjuk teknis (juknis) yang mengatur penggunaan dan pelaporan dana. Hal ini mencakup transparansi dalam penyusunan rencana anggaran berbasis data yang akurat. Jika terdapat siswa yang tidak terdaftar dalam Dapodik, mereka kemungkinan besar tidak akan tercakup dalam distribusi dana BOS. Oleh karena itu, peran kepala sekolah dan operator Dapodik sangat penting untuk memastikan seluruh siswa di sekolah tersebut terdaftar agar dana BOS dapat dinikmati secara adil dan merata.

Di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, pengelolaan dana BOS dipegang oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan

melaksanakan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Kepala sekolah mengarahkan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian buku pelajaran, alat tulis, dan perbaikan fasilitas sekolah. Bendahara sekolah bertugas untuk melakukan pencatatan dan administrasi keuangan, memastikan setiap pengeluaran tercatat dengan benar. Jumlah penerima dana BOS di SD Inpres Pruleme dihitung berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang mencakup seluruh siswa yang bersekolah di sana. Masing-masing siswa mendapatkan alokasi dana yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional sekolah dan jumlah siswa yang ada.

Namun, pengelolaan dana BOS di SD Inpres Pruleme menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penyaluran dan penggunaannya. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pencairan dana yang disebabkan oleh masalah administratif di tingkat pemerintah pusat atau daerah. Selain itu, kepala sekolah dan bendahara di SD Inpres Pruleme sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang cukup tentang pengelolaan keuangan, yang mengakibatkan ketidaksesuaian penggunaan dana. Keterbatasan fasilitas infrastruktur juga mempengaruhi penggunaan dana BOS, karena biaya perbaikan dan pemeliharaan fasilitas di daerah terpencil seperti Puncak Jaya jauh lebih mahal dibandingkan di wilayah perkotaan. Pengawasan yang minim dari pemerintah daerah juga menjadi tantangan besar dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah ini.

Berbagai studi menunjukkan bahwa di daerah-daerah terpencil seperti Puncak Jaya, penggunaan dana BOS sering kali tidak optimal karena kurangnya pelatihan bagi para pengelola sekolah. Pengelolaan dana BOS yang efektif memerlukan pengetahuan yang baik tentang administrasi keuangan, tetapi di banyak sekolah terpencil, kepala sekolah dan bendahara belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait hal ini. Akibatnya,

sering terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan dana yang pada akhirnya menghambat perbaikan mutu pendidikan.

Selain masalah pengelolaan, tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi dana BOS di SD Inpres Pruleme adalah kurangnya pengawasan dan monitoring dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana BOS yang disalurkan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, laporan-laporan menunjukkan bahwa di daerah-daerah terpencil seperti Puncak Jaya, pengawasan terhadap penggunaan dana BOS sangat minim. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

Minimnya pengawasan ini juga memperbesar potensi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS. Di beberapa kasus, dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan operasional sekolah, seperti pembelian buku, alat tulis, atau perbaikan infrastruktur, justru dialokasikan untuk kebutuhan yang tidak relevan. Rendahnya tingkat akuntabilitas ini tidak hanya merugikan pihak sekolah tetapi juga berdampak langsung pada siswa yang seharusnya mendapatkan manfaat dari dana BOS.

Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur juga mempengaruhi efektivitas program BOS di SD Inpres Pruleme. Sekolah-sekolah di Puncak Jaya sering kali tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, atau laboratorium. Bahkan, meskipun dana BOS disalurkan, sekolah-sekolah ini tetap mengalami kesulitan dalam meningkatkan fasilitasnya karena biaya perbaikan infrastruktur di daerah terpencil jauh lebih mahal dibandingkan di wilayah perkotaan.

Selain infrastruktur, masalah lain yang dihadapi adalah ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar. Di wilayah seperti Puncak Jaya, sulit untuk mendatangkan tenaga pengajar yang berkualifikasi baik, karena kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas hidup yang ada. Para guru yang

bertugas di daerah ini sering kali memiliki motivasi rendah dan kurang mendapatkan pelatihan yang memadai. Ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Padahal, salah satu tujuan utama dari dana BOS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui peningkatan kapasitas tenaga pengajar.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS juga menjadi salah satu isu yang patut diperhatikan. Dalam banyak kasus di daerah terpencil, partisipasi masyarakat dalam mendukung proses pendidikan, termasuk dalam pengawasan penggunaan dana BOS, masih sangat rendah. Padahal, sesuai dengan kebijakan yang ada, masyarakat memiliki hak untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam hal ini sering kali membuat proses pengelolaan dana BOS menjadi kurang transparan.

Di samping itu, kebijakan dana BOS memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni mewujudkan generasi yang cerdas, kompetitif, dan berdaya saing. Dalam konteks SD Inpres Pruleme, dana BOS menjadi tulang punggung operasional sekolah yang memungkinkan siswa di daerah terpencil mendapatkan hak pendidikan mereka. Mengangkat tema ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana publik yang signifikan benar-benar mencapai sasaran dan memberikan manfaat maksimal. Dengan mempelajari hambatan dan potensi perbaikan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan berdampak nyata, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) seperti Puncak Jaya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah pada SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya, beserta faktor pendukung, penghambat dan upaya peningkatannya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan efektivitas implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah 3T seperti Kabupaten Puncak Jaya yang selama ini menghadapi tantangan struktural dan geografis dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun dana BOS telah menjadi program nasional yang mendukung operasional sekolah secara menyeluruh, kesenjangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah terpencil masih sangat mencolok. Tanpa evaluasi yang komprehensif terhadap hambatan dan kondisi riil di lapangan, alokasi dana publik berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di SD Inpres Pruleme serta merumuskan rekomendasi strategis agar kebijakan pendidikan lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tertinggal.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut George Edwards III, dikarenakan model ini relevan dengan fokus penelitian. Model implementasi kebijakan menurut George Edwards III (1980) ini menyiratkan bahwa adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara komunikasi dengan struktur birokrasi, komunikasi dengan sumber-sumber, sumber-sumber dengan kecenderungan-kecenderungan yang mana semua sektor tersebut mempunyai arah yang sama yaitu mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Penelitian ini dilakukan di SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya, dengan pertimbangan: Lokasi mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga mempermudah saya dalam melaksanakan penelitian yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada Implementasi Kebijakan

Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya, yang secara khusus bermaksud untuk mendalami faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta upaya-upaya dalam meningkatkan dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya.

Peneliti mencari informan awal yang kemudian meminta informan awal untuk merekomendasikan awal informan berikutnya dan seterusnya, sampai pada informan kunci. Teknik ini disebut juga dengan teknik *snowball*. Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah kepala Sekolah, staf, dan guru yang ada Pada SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya, beserta para siswa dan orang tuanya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab langsung dengan responden menggunakan panduan wawancara, serta observasi non-partisipan, di mana peneliti mengamati tanpa terlibat langsung. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi berupa buku pedoman, laporan, dan kliping koran, serta studi kepustakaan yang mencakup literatur, jurnal, dan sumber lain yang mendukung teori penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Prosesnya mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, yaitu merangkum informasi inti yang relevan; penyajian data untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian; serta penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui verifikasi berulang untuk memastikan validitas hasil penelitian. Analisis ini bertujuan memahami pola secara sistematis serta menyajikan temuan yang objektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah pada SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya

Pada Implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, merupakan upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang signifikan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa pesan kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan. Ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, tenaga kerja, maupun fasilitas, menjadi faktor kunci dalam mendukung pelaksanaan. Disposisi, yang mencakup komitmen dan sikap pelaksana kebijakan, turut menentukan keberhasilan dalam menghadapi tantangan lokal. Selain itu, struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit dapat mempercepat distribusi dan pemanfaatan dana BOS secara tepat sasaran (Edward III, 1980). Studi tentang implementasi kebijakan di daerah terpencil dalam pemberian Dana BOS di SD Perulene menunjukkan bahwa sinergi dari keempat indikator ini menjadi elemen kritis dalam menghadapi tantangan kontekstual (Grindle, 1980; Mazmanian & Sabatier, 1983):

#### Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan ini sampai dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat, baik itu kepala sekolah, guru, staf administrasi, maupun pihak pemerintah daerah. Komunikasi yang efektif membantu dalam menyampaikan tujuan dan prosedur

pelaksanaan dana BOS, serta memastikan bahwa setiap penerima manfaat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan anggaran tersebut. Selain itu, komunikasi juga mencakup koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memfasilitasi aliran dana secara tepat waktu dan transparan. Edward III (1980) menekankan bahwa komunikasi yang jelas antara semua tingkatan pemerintahan dan pihak terkait sangat penting dalam menyukseskan kebijakan publik. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka dan terstruktur, diharapkan bahwa implementasi kebijakan BOS di SD Inpres Pruleme dapat berjalan dengan lancar, mengurangi potensi miskomunikasi, dan memaksimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan merupakan elemen kunci yang memengaruhi keberhasilan distribusi dan pelaksanaan program. Dalam konteks penyaluran dana BOS di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, penggunaan berbagai media komunikasi seperti informasi langsung, pesan singkat melalui media sosial, dan pengumuman di papan informasi menunjukkan upaya untuk memastikan informasi kebijakan dapat menjangkau semua pihak terkait. Edward III (1980) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada sejauh mana pesan kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh para pelaksana dan penerima manfaat. Langkah ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin terjadi akibat kondisi geografis atau kurangnya infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil seperti Puncak Jaya.

Namun, penggunaan media komunikasi harus disesuaikan dengan tingkat literasi dan aksesibilitas masyarakat lokal. Di daerah seperti Kabupaten Puncak Jaya, keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi tantangan serius. Mazmanian dan Sabatier (1983) menggarisbawahi bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan

tidak hanya mencakup penyampaian pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut diterima dan dipahami dengan benar. Oleh karena itu, strategi komunikasi melalui media sosial mungkin tidak efektif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet. Sebaliknya, pendekatan langsung atau melalui media tradisional yang lebih akrab dengan masyarakat setempat dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi.

Selain itu, konsistensi dalam komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Grindle (1980) menyatakan bahwa inkonsistensi dalam informasi dapat menciptakan ketidakpastian yang menghambat implementasi kebijakan. Dengan menginformasikan secara langsung dan mengumumkannya di papan informasi, pemerintah menunjukkan upaya untuk menyediakan alternatif yang lebih dapat diandalkan. Pendekatan ini dapat mempercepat penyaluran dana BOS serta meminimalkan potensi kesalahpahaman. Namun, efektivitas komunikasi ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa informasi benar-benar sampai ke penerima manfaat, khususnya dalam konteks yang memiliki kendala geografis dan sosial seperti di Kabupaten Puncak Jaya.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya. Sumber daya yang dimaksud meliputi anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks SD Inpres Pruleme, keterbatasan anggaran yang tersedia dapat menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pembelian alat peraga, pemeliharaan fasilitas sekolah, dan pemberian insentif bagi guru. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja yang terlatih dan

berkompeten sangat memengaruhi implementasi kebijakan ini, karena para guru dan tenaga administrasi sekolah harus dapat mengelola dana BOS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas sekolah, yang meliputi ruang kelas, sarana pendidikan, serta infrastruktur pendukung lainnya, juga merupakan sumber daya yang vital untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Dalam hal ini, keberhasilan implementasi kebijakan BOS di SD Inpres Pruleme sangat bergantung pada pemenuhan dan pengelolaan sumber daya yang ada dengan baik. Keterbatasan sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun manusia, seringkali menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan, sehingga upaya untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada harus terus dilakukan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. Efektivitas komunikasi antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edwards III (1980), komunikasi yang baik memungkinkan informasi kebijakan disampaikan secara jelas kepada pelaksana, sehingga meminimalkan kesalahan interpretasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan. Dalam konteks ini, intensitas koordinasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam kutipan, memastikan bahwa proses penyaluran dana dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan regulasi. Keberadaan rapat dewan guru serta pelibatan Komite Sekolah memperkuat mekanisme umpan balik yang mendukung komunikasi dua arah.

Selanjutnya, transparansi dalam penyampaian laporan penggunaan dana melalui rapat dewan guru dan kepada Komite Sekolah mencerminkan keberlanjutan komunikasi internal yang efektif. Hasil penelitian Goggin et al. (1990) menggarisbawahi bahwa komunikasi internal yang baik di antara aktor kebijakan memperkuat konsistensi implementasi program. Di SD Inpres Pruleme, komunikasi ini menjadi elemen penting

dalam memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan dalam Rencana Kertas Kerja (RKAS). Mekanisme ini juga memungkinkan pemangku kepentingan internal memahami prioritas penggunaan dana, seperti pembelian alat pembelajaran, pembayaran honor guru, dan pemeliharaan sarana.

Namun, kendala administratif seperti keterlambatan tanda tangan akibat perjalanan dinas menunjukkan adanya potensi gangguan dalam komunikasi lintas tingkat. Sebagaimana diungkapkan oleh Sabatier dan Mazmanian (1980), hambatan komunikasi sering kali disebabkan oleh perbedaan waktu dan aksesibilitas di antara pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, SD Inpres Pruleme telah mengatasi kendala tersebut dengan menggunakan aplikasi RKAS untuk memastikan laporan pertanggungjawaban dikelola secara online, meminimalkan hambatan waktu dalam proses pencairan. Strategi ini mencerminkan adaptasi yang baik terhadap tantangan komunikasi, sehingga memperkuat efektivitas implementasi kebijakan BOS.

### **Disposisi**

Disposisi, dalam konteks implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, merujuk pada sikap, komitmen, dan orientasi dari para pelaksana kebijakan terhadap tujuan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Disposisi yang positif dari kepala sekolah, guru, dan pihak-pihak terkait di tingkat lokal sangat penting untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Di daerah seperti Kabupaten Puncak Jaya, yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang kompleks, disposisi yang baik dari pelaksana kebijakan dapat menjadi faktor penentu dalam menghadapi kendala operasional, seperti keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur yang terbatas. Komitmen untuk mengoptimalkan penggunaan dana BOS dalam

meningkatkan kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari kesediaan pelaksana kebijakan untuk menghadapi tantangan yang ada, seperti rendahnya tingkat pendidikan atau keterbatasan sumber daya manusia. Jika pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan di daerah tersebut, maka implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan dampak positif yang lebih besar bagi sekolah dan masyarakat setempat.

Disposisi pada implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan bahwa prosedur penyaluran dana BOS umumnya berjalan lancar, meskipun terdapat beberapa hambatan administratif yang bersifat teknis, seperti keterlambatan penandatanganan surat rekomendasi oleh pejabat terkait yang disebabkan oleh perjalanan dinas. Menurut Sabatier (2005), disposisi dalam implementasi kebijakan mencakup sikap dan komitmen aktor-aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, meskipun ada keterlambatan, pihak sekolah dan Dinas Pendidikan tetap menunjukkan komitmen dalam memastikan aliran dana BOS sampai ke sekolah tepat waktu. Komitmen ini tercermin dalam upaya sekolah untuk tetap mengikuti prosedur yang ada dan menjaga koordinasi dengan Dinas Pendidikan serta pihak terkait lainnya, seperti Komite Sekolah dan Inspektorat Kabupaten.

Pentingnya koordinasi yang baik antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan pihak-pihak lain yang terlibat, seperti Komite Sekolah dan Inspektorat, juga menggambarkan disposisi positif dari aktor-aktor yang terlibat. Disposisi yang baik dari kepala sekolah, bendahara, dan guru dalam pengelolaan dana BOS dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagai contoh, penggunaan dana BOS untuk pembelian alat pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas

pendidikan meski dalam keterbatasan sumber daya. Hal ini sesuai dengan temuan Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya kualitas pendidikan yang merata melalui pengelolaan dana yang efisien dan akuntabel (Setiawan, 2020).

Selain itu, pengawasan yang melibatkan Inspektorat Kabupaten dan Komite Sekolah sebagai wakil orang tua menunjukkan adanya kontrol yang transparan dalam pengelolaan dana BOS. Menurut Grindle (1980), pengawasan yang melibatkan berbagai pihak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dan Inspektorat juga membantu dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kepentingan pengelolaan operasional sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa hambatan teknis, disposisi yang baik dari semua pihak yang terlibat memungkinkan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai tujuan.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, memainkan peran krusial dalam memastikan keberhasilan distribusi dan penggunaan dana yang efektif dan tepat sasaran. Struktur birokrasi yang jelas dan efisien diperlukan untuk mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, kepala sekolah, dan tenaga pendidik, agar seluruh proses administrasi dapat berjalan lancar. Dalam konteks ini, birokrasi harus mampu mengatasi tantangan geografis dan infrastruktur yang terbatas, sehingga alokasi dana BOS dapat sampai ke sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Keterbukaan dalam struktur birokrasi, di mana setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik, akan mengurangi potensi kebingungannya dalam proses pengajuan dan pencairan dana BOS. Selain itu, birokrasi yang responsif terhadap kondisi lokal diharapkan dapat menyesuaikan prosedur dengan tantangan khusus di wilayah Puncak Jaya, serta mengakomodasi kebutuhan sekolah-sekolah di daerah tersebut dalam konteks yang lebih praktis dan aplikatif.

Adanya struktur birokrasi yang jelas dan berlapis dalam implementasi pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya. Prosedur penyaluran dana dimulai dari verifikasi rekening sekolah dan pengajuan surat permintaan pencairan, yang mencerminkan tingginya tingkat koordinasi antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya. Kepala Sekolah, sebagai penanggung jawab utama, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa dana BOS diterima dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini menekankan pentingnya keberadaan struktur birokrasi yang mendukung pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Adanya proses yang jelas dari pengajuan hingga pencairan dana menunjukkan bahwa terdapat struktur yang mendetail dan prosedural, yang membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana.

Selanjutnya, dalam pengelolaan dana BOS, bendahara sekolah dan tim BOS di sekolah memainkan peran penting dalam penyusunan rencana anggaran melalui aplikasi RKAS Kemendikbud. Pengelolaan anggaran ini melibatkan komunikasi yang efektif antara Kepala Sekolah, bendahara, dewan guru, dan komite sekolah. Struktur birokrasi yang melibatkan berbagai pihak ini memperlihatkan pendekatan kolaboratif dalam merencanakan dan mengelola dana BOS, yang penting untuk memastikan bahwa dana digunakan untuk kepentingan yang benar-benar mendukung operasional dan kualitas pendidikan di sekolah.

Penggunaan aplikasi RKAS juga mencerminkan adaptasi teknologi dalam manajemen dana, yang semakin diperlukan dalam pengelolaan dana pendidikan modern.

Pengawasan terhadap penggunaan dana BOS dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat Kabupaten, dan Komite Sekolah, yang semuanya memiliki peran dalam memastikan bahwa dana digunakan dengan efisien dan akuntabel. Komite Sekolah, sebagai perwakilan orang tua murid, turut mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap penggunaan dana, yang menunjukkan adanya kontrol sosial dalam pengelolaan dana BOS. Struktur birokrasi ini memungkinkan pengawasan yang holistik dan terkoordinasi, yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Semua prosedur dan struktur yang diterapkan di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023, yang memberikan pedoman mengenai pengelolaan dana BOS secara transparan dan akuntabel.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah pada SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya**

#### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, merujuk pada segala elemen yang memfasilitasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor-faktor ini melibatkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa faktor pendukung utama mencakup komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah, yang memastikan informasi tentang kebijakan dan prosedur dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak

yang terlibat. Selain itu, sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk dana, fasilitas pendidikan, maupun tenaga pengajar yang terlatih, menjadi hal yang krusial untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak Jaya, yang berperan dalam pengawasan dan pendampingan teknis, serta masyarakat setempat yang mendukung kebijakan tersebut. Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, implementasi kebijakan BOS di SD Inpres Pruleme dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga tujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa dapat tercapai.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, melibatkan sejumlah elemen yang berperan dalam memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut. Komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah, merupakan salah satu faktor kunci. Komunikasi yang baik memastikan bahwa informasi tentang kebijakan dan prosedur dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat, yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan (Grindle, 1980).

Selain itu, tersedianya sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk dana, fasilitas pendidikan, maupun tenaga pengajar yang berkualitas, juga menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Sumber daya yang memadai sangat mendukung kelancaran proses pendidikan di sekolah, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan yang lebih baik bagi siswa (Setiawan, 2020). Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan BOS tidak akan dapat berjalan dengan optimal, meskipun prosedur administrasi telah diikuti dengan benar.

Dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten

Puncak Jaya, juga memegang peranan penting dalam proses implementasi kebijakan BOS. Dinas Pendidikan berperan dalam memberikan pengawasan serta pendampingan teknis yang dibutuhkan oleh sekolah, yang akan mempermudah sekolah dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan tujuan kebijakan (Sabatier, 2005). Selain itu, masyarakat setempat yang mendukung kebijakan ini turut memperkuat fondasi implementasi, karena dukungan masyarakat menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk menjalankan kebijakan.

Dengan adanya berbagai faktor pendukung tersebut, implementasi kebijakan BOS di SD Inpres Pruleme dapat berjalan lebih efektif. Faktor-faktor seperti komunikasi yang baik, sumber daya yang memadai, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa tujuan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai. Hal ini menegaskan pentingnya peran kolaborasi berbagai pihak dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Grindle, 1980; Setiawan, 2020).

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, merujuk pada berbagai tantangan yang menghalangi tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Beberapa faktor penghambat yang mungkin terjadi di daerah terpencil seperti Kabupaten Puncak Jaya antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kendala dalam komunikasi antar pihak terkait. Keterbatasan infrastruktur, seperti kondisi jalan yang buruk atau sulitnya akses ke sekolah, dapat memperlambat distribusi dana BOS atau bahkan menghambat implementasi program di sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan tersebut. Selain itu, kurangnya pelatihan dan kapasitas manajerial di tingkat sekolah maupun pemerintahan daerah dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana BOS. Disamping itu, ketidakefektifan

komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam penyaluran dan penggunaan dana. Faktor-faktor ini dapat memperburuk dampak kebijakan BOS, menghalangi pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan yang diharapkan. Faktor penghambat ini perlu diidentifikasi dan diatasi melalui perbaikan dalam sistem distribusi, pelatihan intensif untuk pihak terkait, serta pembenahan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, melibatkan berbagai tantangan yang dapat menghalangi keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi di daerah terpencil seperti Kabupaten Puncak Jaya adalah keterbatasan infrastruktur. Misalnya, kondisi jalan yang rusak atau sulit dijangkau dapat memperlambat proses distribusi dana BOS ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Hal ini tentu berdampak pada ketepatan waktu dalam pencairan dana yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional sekolah (Prasojo & Asrori, 2019).

Selain masalah infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan BOS. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi pihak sekolah dan pengelola dana BOS di tingkat daerah dapat mengurangi efektivitas penggunaan dana yang diterima. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai tata kelola dan penggunaan dana, pihak sekolah mungkin kesulitan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara efisien (Amin & Abdullah, 2017).

Komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah juga berpotensi menimbulkan kendala dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS. Ketidaksiharian informasi atau kesalahpahaman mengenai prosedur dapat menghambat kelancaran distribusi dana.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk memperbaiki alur komunikasi dan koordinasi guna memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dijalankan dengan tepat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Sutanto & Yuliana, 2020).

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat ini, perlu ada upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif dan pembenahan infrastruktur yang mendukung. Selain itu, sistem distribusi yang lebih efisien dan komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan akan mempercepat implementasi kebijakan BOS dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan (Sanjaya, 2018).

#### **Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah pada SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya**

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen SD Inpres Pruleme Kabupaten Puncak Jaya dari hasil observasi yang kami lakukan dan juga berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Kepala sekolah dan guru terkait situasi keamanan sehingga kami melalui telepon mendapat informasi yang dapat kami identifikasi berikut ini:

*Pertama*, Perencanaan dan Pengelolaan Dana BOS yang Transparan dengan rincian kegiatan seperti Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian, melibatkan komite sekolah, guru, dan masyarakat dalam penyusunan RKAS agar penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan. Serta, mengikuti pedoman teknis BOS yang ditetapkan oleh pemerintah.

*Kedua*, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, seperti melatih kepala sekolah, bendahara, dan guru dalam pengelolaan dana BOS agar sesuai dengan regulasi. Kemudian, mengadakan sosialisasi bagi guru dan tenaga kependidikan mengenai penggunaan dana

BOS untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu memberikan pemahaman kepada orang tua siswa mengenai manfaat dana BOS agar dapat turut mengawasi implementasinya.

*Ketiga*, Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana BOS dengan mempublikasikan penggunaan dana BOS melalui papan informasi sekolah atau media lain yang mudah diakses. Kemudian melaksanakan rapat rutin dengan komite sekolah untuk membahas realisasi penggunaan dana. Serta menyediakan laporan penggunaan dana BOS yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

*Keempat*, Optimalisasi Penggunaan Dana BOS untuk Peningkatan Mutu Pendidikan, salah satunya dengan memastikan dana BOS digunakan untuk kebutuhan utama seperti pembelian buku, alat tulis, dan sarana pembelajaran. Kemudian, memperbaiki infrastruktur sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Lalu Menyediakan dukungan bagi siswa kurang mampu untuk menghindari putus sekolah.

*Kelima*, Pengawasan dan Evaluasi Secara Berkala, dengan melaksanakan audit internal untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, melibatkan komite sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana BOS. Serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan BOS di SD Inpres Pruleme, Kabupaten Puncak Jaya, masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana. Penyebaran informasi mengenai prosedur penggunaan dana masih terbatas, ditambah dengan koordinasi yang belum optimal antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan komite sekolah. Keterbatasan kompetensi pengelola keuangan serta infrastruktur yang kurang memadai juga menghambat efektivitas pemanfaatan dana

BOS. Selain itu, prosedur birokrasi yang kompleks menyebabkan keterlambatan pencairan dan pelaporan, sementara sistem monitoring yang belum terintegrasi mengurangi efektivitas pengawasan. Meski kepala sekolah dan bendahara menunjukkan komitmen dalam pengelolaan, pemahaman terhadap aturan teknis masih menjadi tantangan, dan partisipasi komite sekolah dalam pengawasan perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana BOS lebih transparan dan akuntabel.

Faktor pendukungnya adalah Sikap pelaksana komunikasi efektif antara sekolah dan Dinas Pendidikan, dukungan masyarakat, serta pengawasan Komite Sekolah. Transparansi pelaporan keuangan melalui rapat dewan guru dan Komite Sekolah meningkatkan akuntabilitas, sementara koordinasi yang baik memastikan efisiensi kebijakan dan peningkatan kualitas pendidikan. Sementara faktor penghambatnya adalah keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas pengelolaan anggaran, dan miskomunikasi antar pemerintah. Akses jalan yang sulit memperlambat distribusi dana, sementara keterampilan SDM yang terbatas mengurangi efektivitas pengelolaan. Untuk mengatasinya, diperlukan pelatihan intensif dan sistem distribusi yang lebih efisien.

Upaya peningkatan pengelolaan dana BOS dilakukan dengan perencanaan dan transparansi melalui penyusunan RKAS yang melibatkan komite sekolah, guru, dan masyarakat sesuai pedoman teknis. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan pelatihan bagi kepala sekolah, bendahara, dan guru serta sosialisasi penggunaan dana kepada tenaga pendidik dan orang tua. Transparansi dan akuntabilitas dijaga dengan mempublikasikan laporan penggunaan dana, mengadakan rapat rutin, dan menyediakan laporan yang dapat diakses masyarakat. Optimalisasi dana difokuskan pada kebutuhan utama seperti buku, alat tulis, perbaikan infrastruktur, dan dukungan bagi siswa kurang mampu. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara

berkala melalui audit internal, keterlibatan komite sekolah dan dinas pendidikan, serta penilaian efektivitas penggunaan dana dalam meningkatkan mutu pendidikan.

### REKOMENDASI RISET

Rekomendasi dari hasil penelitian ini, *Pertama*, Sebaiknya pemerintah meningkatkan Infrastruktur dan Dukungan Logistik, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya perlu meningkatkan infrastruktur, khususnya akses jalan ke daerah terpencil, untuk memperlancar distribusi dana BOS tepat waktu. Kemudian, Pelatihan Manajemen Keuangan, Memberikan pelatihan intensif bagi kepala sekolah, bendahara, dan pengelola lainnya terkait pengelolaan dana BOS berbasis aplikasi RKAS agar dapat memaksimalkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana. Lalu optimalisasi Pengawasan, memperkuat peran pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten dengan

menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi digital untuk mendukung transparansi pengelolaan dana.

*Kedua*, untuk SD Inpres Pruleme. Prioritas Pemanfaatan Dana, Memastikan penggunaan dana BOS sesuai RKAS yang telah disahkan dengan prioritas utama pada pemeliharaan fasilitas sekolah, peningkatan kualitas pengajaran, dan penyediaan sarana belajar. Kemudian, meningkatkan Transparansi Internal, Melakukan pelaporan rutin secara terbuka kepada guru, komite sekolah, dan orang tua siswa terkait penggunaan dana BOS untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Lalu, kolaborasi dengan Komunitas Lokal: Melibatkan masyarakat sekitar, termasuk orang tua siswa, dalam pengawasan dan pemberian masukan terkait kebutuhan prioritas yang dapat didukung melalui dana BOS.

### DAFTAR PUSTAKA

- Banding, M. P. (2024). *Meningkatkan Kinerja Sekolah Melalui Dana Bos: Analisis Efektivitas*. Mega Press Nusantara.
- Edward, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole, L. J. (1990). *Implementation theory and practice: Toward a third generation*. Scott Foresman.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.
- Nursiniah, S., & Aliyyah, R. R. (2024). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2832-2855.
- Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
- Prasojo, L. A., & Asrori, M. (2019). The role of infrastructure in policy implementation: A case study in remote areas of Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(3), 236-249.
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110-117.
- Ritaudin, A. (2021). Manajemen Budaya Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Media Manajemen Pendidikan*, 3(3), 397-406.
- Sanjaya, B. (2018). *Education policy implementation in Indonesia: Issues and solutions*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Setiawan, B., & Firmansyah, R. (2020). Analisis Implementasi Dana BOS di Sekolah Dasar: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(3), 45-60.
- Setiawan, R. (2020). *Kebijakan pendidikan dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan.

Winaya, I. M. A., Wijaya, P. E. P., Sudiarta, I. N., & Sutika, I. M. (2022). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar. *Widya Accarya*, 13(2), 133-144.